

Implikasi *social mapping* terhadap human security di kampung Gurimbang

Sonny Sudiar^{1✉}, Rahmah Daniah², Aisyah³, Andi Purnawarman⁴, Nur Azizah⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pemetaan sosial di Kampung Gurimbang (Berau). Konsep keamanan manusia menjadi topik penting ketika berkaitan dengan pemetaan sosial. Menyikapi persoalan tersebut, dokumen pemetaan sosial merupakan dokumen yang sangat penting, karena merupakan data baseline kondisi masyarakat dan aktor-aktor yang perlu dikelola. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pendekatan kualitatif yang diterapkan. Data diperoleh melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam kepada beberapa informan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan penekanan pada proses data segmentasi. Hasil pemetaan jejaring sosial Kampung Gurimbang menunjukkan adanya interaksi yang saling melengkapi antar aktor. Hubungan komplementer ini dapat dilihat di hampir setiap lini interaksi antara individu, kelompok dan institusi.

Kata kunci: Pemetaan sosial; pengamanan manusia; Gurimbang; batubara Berau

Implications of social mapping on human security in Gurimbang village

Abstract

The purpose of this article is to describe the social mapping at Kampung Gurimbang (Berau). The concept of human security is becoming an important topic when it relates to the social mapping. Responding to the issue, the social mapping document is a very important document, because it is the baseline data on the condition of the community and the actors that need to be managed. This study is a field research qualitative approach was applied. Data obtained through participant observation and in-depth interview to several informants. Data was analyzed using descriptive method with emphasizing in data segmentation process. The results of the mapping of the social network of Kampung Gurimbang show that there are complementary interactions between actors. This complementary relationship can be seen in almost every line of interaction between individuals, groups and institutions.

Key words: *Social mapping; human security; gurimbang; berau coal*

PENDAHULUAN

Konseptualisasi keamanan (human security) merupakan ekstensi gagasan dari studi keamanan dalam studi Hubungan Internasional yang diintroduksi melalui reformulasi konsep keamanan oleh Barry Buzan dkk yang terafiliasi dalam mazhab Kopenhagen (Sudiar, 2019). Studi keamanan mengalami transformasi, jika pada awalnya konsep keamanan dimaksudkan sebagai kajian tradisional tentang keamanan nasional yang bersifat militeristik maka dalam perkembangannya studi keamanan juga mulai memasukan isu-isu non-tradisional seperti demokrasi, HAM, lingkungan, kekerasan struktural, dan konflik sosial-budaya (Booth, 1991). Secara substantif konsep keamanan manusia mengidentifikasi adanya tiga macam ancaman yakni ancaman sosial ekonomi, ancaman keamanan personal, dan ancaman lingkungan. Dengan begitu pertimbangan untuk memperhatikan keamanan manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi sangat relevan. Untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul akibat implementasi program pembangunan maka terlebih dahulu perlu dilakukan pemetaan sosial (social mapping).

Berdasarkan aturan tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (proper menlhk, 2013), telah disyaratkan bahwa setiap perusahaan wajib memiliki dokumen social mapping sebagai dasar perencanaan Program CSR. Dokumen tersebut harus diperbarui setiap tahun dan paling lambat 4 tahun sekali. Di luar konteks Proper, dokumen social mapping merupakan dokumen yang sangat penting, karena merupakan baseline data kondisi masyarakat serta aktor/tokoh yang perlu dikelola oleh perusahaan.

PT. Berau Coal yang berlokasi di Kabupaten Berau berada dekat dengan kawasan pemukiman penduduk. Kampung Gurimbang adalah salah satu wilayah operasinya. PT. Berau Coal dalam menjalankan aktivitasnya, dengan demikian banyak bersinggungan dengan beragam stakeholder, baik masyarakat maupun pemerintah setempat, serta LSM di wilayah tersebut.

Setiap stakeholder tentu saja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Berau berkepentingan melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Sementara para pengusaha dan sektor swasta mempunyai kepentingan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Sementara itu, LSM dan masyarakat juga berkepentingan melaksanakan kegiatannya agar memperoleh tingkat kehidupan yang lebih baik.

Fenomena ini mengharuskan PT. Berau Coal mengetahui masing-masing kepentingan dan kebutuhan stakeholder. Disisi lain, PT. Berau Coal dalam melakukan operasionalnya telah menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Apabila dampak negatif tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan di masa selanjutnya.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan harus turut serta dalam melakukan program-program pengembangan masyarakat dan wilayah di sekitar operasional perusahaan (community development). Maka dari itu artikel ini adalah sebuah upaya deskriptif tentang analisis pemetaan sosial yang dilakukan oleh PT. Berau Coal dan implikasinya terhadap keamanan manusia (human security) di Kampung Gurimbang.

METODE

Penelitian lapangan ini dilaksanakan dalam dua tahap selama 4 (empat) bulan. Tahap pertama dilaksanakan dari bulan Februari-Maret 2020 (1 bulan), kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua pada bulan Mei-Juli 2020 (3 bulan). Lokasi yang menjadi daerah observasi adalah Kampung Gurimbang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pengambilan data primer dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam di lokasi penelitian. Adapun data sekunder dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber di instansi pemerintah dan swasta yang terkait dengan penelitian ini seperti: Monografi Desa, Profil Desa, Laporan Penyuluh dan berbagai pustaka yang relevan. Analisis data terdiri dari komponen reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Empat komponen tersebut saling berinteraksi dan merupakan kegiatan siklus.

Pemetaan Sosial dan Keamanan Manusia: Konseptualisasi Pembangunan

Pembangunan masyarakat desa/kampung adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa/kampung dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan potensi sumber daya alam mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan

dan prakarsa masyarakat yang berbasis pada aspek kebutuhan dasar masyarakat desa (Sudiar, 2015). Oleh karena program pembangunan sudah semestinya sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai kebutuhan masyarakat di suatu wilayah, maka perlu dilakukan analisis pemetaan sosial. Dengan begitu kajian literatur dengan pemetaan sosial dan keamanan manusia menjadi relevan dilakukan dalam penulisan artikel ini.

Pemetaan sosial merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan guna memahami kondisi sosial masyarakat lokal, karena setiap masyarakat memiliki kondisi sosial yang berbeda yang dapat mengakibatkan masyarakat mempunyai masalah dan kebutuhan yang berbeda pula. Pemetaan sosial disamping dapat mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, potensi sumberdaya dan modal sosial masyarakat, juga dilakukan untuk mengenal stakeholder dalam hubungannya dengan keberadaan dan aktivitas pelaku dalam program, mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menganalisis potensi konflik yang ada pada masyarakat (Handoyo & Sudrajat, 2016).

Pemetaan sosial (social mapping) merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profile dan masalah sosial yang ada pada masyarakat yang bersangkutan (Nuryati dkk, 2020).

Program-program pengembangan masyarakat dapat juga berperan sebagai "licence to operate" bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan aman dan lancar. Supaya program-program pengembangan masyarakat dapat sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat, maka perusahaan perlu melakukan pemetaan sosial di wilayah operasional perusahaan. Lantas bagaimana keterkaitannya dengan hal keamanan manusia, apa maksud penggunaan konsep keamanan manusia dalam tulisan, sebelum menjelaskan maksudnya, berikut ini terlebih dahulu diuraikan konsep keamanan manusia.

Keamanan manusia menjadi perhatian serius di seluruh dunia dan konsep ini berkembang dalam diskursus keamanan. Berbeda dengan wacana tradisional yang lebih menekankan pada keamanan negara, wilayah, atau pemerintahan tertentu, konsep keamanan manusia terfokus pada keamanan individu dan masyarakat (Sudiar, 2019). Singkatnya konsep keamanan manusia selalu menempatkan individu sebagai sentral objek dalam wacana, analisis, dan kebijakan (Nishikawa, 2010), yang juga meliputi prinsip-prinsip nilai seperti martabat, kesetaraan, dan solidaritas.

Gagasan tentang keamanan manusia, bagaimanapun, tunduk pada berbagai interpretasi. Kadang-kadang menekankan pada keselamatan orang (misalnya kebebasan dari ancaman terhadap kehidupan seperti yang disebabkan oleh konflik bersenjata), sementara di lain waktu, kondisi hidup orang (misalnya penghapusan kemiskinan dan keterbelakangan) atau martabat (misalnya promosi nilai-nilai kemanusiaan dan hak). Sebagai sebuah gagasan, keamanan manusia pertama kali diperkenalkan di arena internasional melalui publikasi Laporan Pembangunan Manusia UNDP tahun 1994. Keamanan manusia didefinisikan secara luas sebagai "kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan" dan ditandai sebagai keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan serta perlindungan dari gangguan mendadak dan berbahaya dalam pola kehidupan sehari-hari—baik di rumah, dalam pekerjaan, atau dalam masyarakat (UNDP, 1994: 23). Pendekatan yang berpusat pada keamanan individu oleh UNDP kemudian dikembangkan dengan tujuh komponen universal dan saling bergantung satu sama lain, yaitu; ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat, dan keamanan politik (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Keamanan manusia adalah konsep yang membongkar makna 'keamanan' dari konsep tradisionalnya, yaitu pengamanan negara dari ancaman-ancaman militer menjadi pengamanan orang dan komunitas. Hingga saat ini, keamanan manusia memang bukan sebuah konsep tunggal. Konsep dan definisi tentang keamanan manusia datang dari berbagai kalangan dan kelompok seperti organisasi internasional, lembaga regional, dan aktor negara yang mendiskusikannya di berbagai forum dan konferensi internasional. Uni Eropa, Kanada, Jepang, UNDP, dan para akademisi datang dengan beragam definisi, mulai dari pandangan sempit seperti pencegahan dari aksi kekerasan sampai pada pandangan komprehensif bahwa pembangunan, HAM, dan keamanan tradisional telah menjadi kebutuhan bersama seluruh umat manusia di muka bumi. Konsepsi keamanan manusia memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi keamanan. Premis yang ditawarkan dalam konsepsi keamanan manusia berfokus pada eksistensi individual, namun secara lebih luas konsepsi ini juga mencakup hal-hal berkaitan dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai seperti perlindungan terhadap martabat, persamaan, dan solidaritas individu.

Konsep keamanan manusia merujuk pada pergeseran fokus pembangunan serta keamanan tradisional yang menitikberatkan pada angka-angka maupun statistik formal. Dalam kaitannya dengan pembangunan, konsep ini mendukung tujuan dari pembangunan sebagaimana yang dilaksanakan oleh negara-negara di dunia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun, paradigma pembangunan yang dianut oleh banyak negara di dunia lebih cenderung merefleksikan pandangan tradisional yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan. Merujuk pada uraian di atas, maka konsep keamanan manusia menjadi relevan untuk diikutsertakan dalam artikel ini sebagai alat analisis yang dapat menjelaskan kondisi masyarakat di lokasi penelitian.

Pemetaan Sosial Kampung Gurimbang

Kampung Gurimbang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Posisi Gurimbang terletak pada garis 117,3560° Bujur Timur dan 2,1114° Lintang Selatan dengan ketinggian 155 mdpl. Curah hujan di wilayah Kampung Gurimbang sebesar 480 mm dimana jumlah bulan hujan dalam setahun sekitar 4 bulan dengan kelembaban 23% dan suhu rata-rata harian 300C. Topografi Kampung Gurimbang dominan berbukit-bukit dengan luas sekitar 6.000 hektar, dataran tinggi/pegunungan seluas 2.000 hektar, terdapat pula dataran rendah seluas 3.500 hektar serta kawasan gambut seluas 1.500 hektar. Berdasarkan orbitasi dengan menggunakan kendaraan bermotor, jarak Kampung Gurimbang ke ibukota Kecamatan Sambaliung sejauh 18 km yang dapat ditempuh dalam waktu 20 menit. Jarak Gurimbang ke ibukota Kabupaten Berau (Tanjung Redeb) sejauh 20 km (waktu tempuh 30 menit). Adapun jarak ke ibukota provinsi Kalimantan Timur (Samarinda) sejauh 650 km dengan waktu tempuh 11 jam. Batas-batas wilayah Kampung Gurimbang adalah sebagai berikut: sebelah utara: Kampung Suaran, sebelah selatan: Kampung Samburakat, sebelah timur: Kampung Tanjung Prangat, dan sebelah barat: Kampung Sei Bebanir Bangun.

Hasil penelusuran lapangan setidaknya 20 aktor telah teridentifikasi dalam pemetaan jaringan sosial yang memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan sosial di Kampung Gurimbang. Posisi dan peran sosial dari aktor-aktor tersebut dapat dilihat dalam rincian di bawah ini:

Tabel 1.
 Aktor Penting dalam Dinamika Kehidupan Sosial Kampung Gurimbang

Aktor	Posisi	Peran
Edi Gunawan	Kepala Kampung	Katalisator informasi, Koordinator perencana dan pelaksana program pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat
Arifin	Sekretaris Kampung	Membantu tugas-tugas Kepala Kampung
Syaifuddin	Kasi Pemerintahan	Administrator bidang pemerintahan
Rusdi	Ketua BPK	Penyerap aspirasi masyarakat kampung
Ahmad Yani	RT 1	Pelayanan administrasi kependudukan
Kasiran	RT 2	Pelayanan administrasi kependudukan
Abidin	RT 3	Pelayanan administrasi kependudukan
Fajar	RT 4	Pelayanan administrasi kependudukan
Kama Mahendra	RT 5	Pelayanan administrasi kependudukan
Hendrik	RT 6	Pelayanan administrasi kependudukan
Abdul Gani	RT 7	Pelayanan administrasi kependudukan
Kaluh	RT 8	Pelayanan administrasi kependudukan
Gunawan	Babinsa	Tokoh yang melakukan pencegahan dini terhadap potensi friksi, konflik, bencana dan keadaan darurat bencana dan lain sebagainya
Syamsul	Bamtibmas	Tokoh yang melakukan pencegahan dini terhadap potensi friksi, konflik, bencana dan keadaan darurat bencana dan lain sebagainya
Kasim	Tokoh Agama	Kehidupan rohani masyarakat kampung
Madri Pani	Tokoh Masyarakat	Memaksimalkan kedudukan dalam advokasi kebutuhan masyarakat
July	Tokoh Adat	Memberikan masukan terkait adat-istiadat
Ariady	Karang Taruna	Penggerak Program Kepemudaan
Hendra	Tokoh Pemuda	Penggerak pemuda
Ramli	Ketua BUMK	Mengelola kegiatan usaha milik Kampung

Merujuk pada rincian posisi dan peran aktor/tokoh tersebut di atas maka dapat dideskripsikan jaringan sosial yang terbentuk di Kampung Gurimbang. Jaringan sosial Kampung Gurimbang sebagai salah satu daerah buffer zone PT Berau Coal menjadi penting untuk dipetakan dengan maksud untuk menemukenali kondisi sosial ekonomi masyarakat dan budaya masyarakat setempat.

Banyak aktor dalam proses interaksi sosial di wilayah ini baik secara individu, kelompok dan institusi. Dalam interaksinya para aktor ini saling terkait dan masing-masing memiliki karakteristik dan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Demikian pula dengan wawasan, orientasi dan kepentingan yang melandasi setiap aksi dan aktivitas dari setiap aktor.

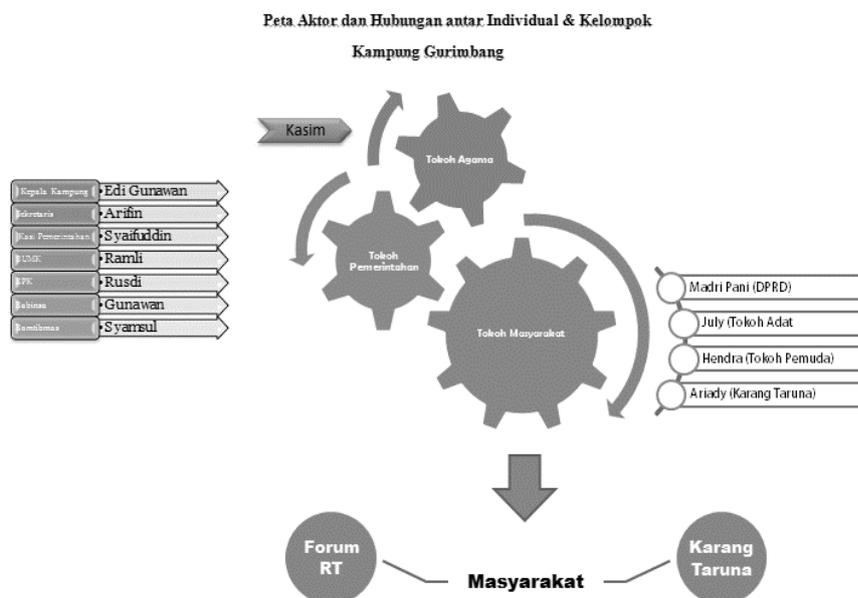
Adapun output pemetaan jaringan sosial ini mampu menghasilkan data dan informasi mengenai kondisi psikografis, pola komunikasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Gurimbang. Hasil pemetaan diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan pendekatan dan pelaksanaan program corporate social responsibility PT. Berau Coal di Kampung Gurimbang, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana kerja yang sifatnya taktis terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hasil temuan lapangan menunjukkan adanya hubungan positif antara individu dan kelompok dengan institusi misalnya ditunjukkan oleh peran Kepala Kampung Edi Gunawan (representasi institusi) sebagai katalisator berbagai informasi baik yang berasal dari pemerintah Kabupaten maupun pihak eksternal lainnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di bidang pemerintahan Kampung dan pelayanan kepada masyarakat beliau dibantu oleh bapak Arifin yang menjabat sebagai Sekretaris Kampung. Dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan beliau terlihat sering ikut terlibat dalam kegiatan gotong-royong bersama masyarakat kampung. Gambaran kehidupan tersebut mengindikasikan hubungan yang resiprokal antara individu dan kelompok yang baik dalam tatanan kehidupan masyarakat kampung.

Lebih lanjut interaksi dinamik juga terlihat dalam hubungan antara pemerintah Kampung dengan bapak Rusdi yang menjabat sebagai Ketua BPK meskipun tidak dominan terlihat dalam pergaulan sosial, beliau terlibat sangat aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat kampung Gurimbang terutama dalam merencanakan agenda pembangunan kampung. Selain itu pemerintah Kampung juga diperkuat oleh kehadiran pak Syaifuddin selaku Kasi Pemerintahan yang menjadi ujung tombak pelayanan publik yang dilakukan bagi masyarakat kampung Gurimbang. Lebih lanjut institusi pemerintahan juga dilengkapi organ ke pemerintahannya lainnya, yaitu BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) yang dipimpin oleh bapak Ramli, dan kegiatan yang dikelola oleh BUMK Gurimbang adalah penyediaan jasa catering makanan kepada perusahaan dan pengadaan peralatan kantor kampung. Potret hubungan aktor-aktor pemerintahan di atas bukan saja merupakan representasi individu tapi juga merefleksikan hubungan antara individu dengan institusi karena peran dan posisi masing-masing aktor yang juga merupakan representasi institusi pemerintahan.

Contoh hubungan positif yang lain juga ditunjukkan pada garis interaksi antara Gunawan dan Syamsul selaku Babinsa dan Babinkamtibmas (tokoh pemerintahan/institusi) dalam menjaga kondusifitas daerah Kampung Gurimbang bersama tokoh-tokoh pemuda dan adat di wilayah tersebut. Hubungan positif juga ditunjukkan oleh garis interaksi antara Bapak July, Bapak Kasim dan saudara Hendra dan saudara Ariady sebagai tokoh adat dan sekaligus sebagai ketua kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain seperti Forum RT, Karang Taruna dan lain sebagainya. Lebih lanjut secara spesifik dapat ditegaskan bahwa salah satu aktor yang ketokohnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah peran bapak Madri Pani (Eks. Kepala Kampung/saat ini menjadi menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Berau 2019-2024), menurut sudut pandang masyarakat selama menjabat sebagai anggota parlemen beliau juga kerap kali membantu dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang beroperasi di Kampung Gurimbang perihal penggunaan hak lahan.

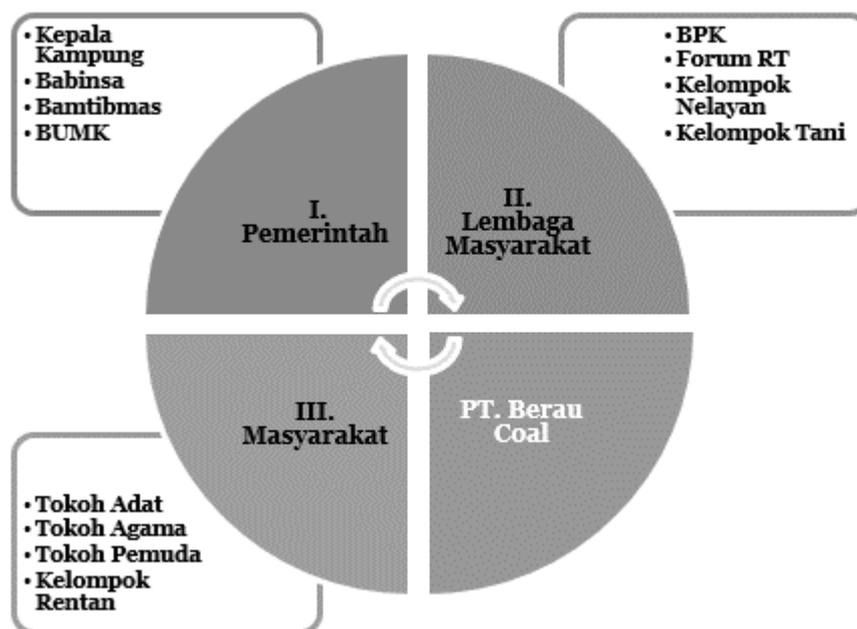
Hasil pemetaan jaringan sosial Kampung Gurimbang diketahui ada interaksi antar aktor yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi. Hubungan yang saling melengkapi tersebut dapat terlihat di hampir setiap garis interaksi antar individu, kelompok dan institusi. Sebagaimana yang dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Gambar 1.
Hubungan interaksi antar aktor

Seperti disebutkan sebelumnya banyak pihak berperan dalam kehidupan masyarakat di Kampung Gurimbang. Selain aktor individu, ada pula aktor institusi yang secara aktif terlibat dalam peta sosial masyarakat. Selanjutnya hasil pemetaan sosial di kampung Gurimbang menunjukkan terdapat beberapa stakeholder dan aktor yang berkontribusi dalam pembangunan di wilayah tersebut. Adapun stakeholder dan aktor yang terlibat dalam pembangunan wilayah kampung Gurimbang dapat dilihat pada gambar di atas. Masing-masing stakeholder memiliki kepentingan dan kekuatan untuk mendorong pembangunan. Besarnya kepentingan dan kekuatan para pihak berimbas secara langsung kepada semakin luasnya pengaruh aktor yang bersangkutan terhadap lingkungan sekitarnya baik lingkungan internal di masyarakat maupun lingkungan eksternal yang lebih luas.

Terlepas dari besarnya derajat kekuatan dan kepentingan setiap aktor sebagai stakeholder dalam pembangunan kampung, terdapat satu hal yang positif, yakni jika semua pihak bersinergis dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan bukan tidak mungkin dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Mengingat hal ini maka analisis jaringan stakeholder dan aktor yang berperan di dalamnya menjadi perlu untuk dilakukan, berikut ini adalah matrik analisis jaringan aktor dan stakeholder pembangunan di Kampung Gurimbang:



Gambar 2.

Matrik analisis jaringan aktor dan stakeholder

Berdasarkan matriks di atas, maka stakeholder pembangunan di Kampung Gurimbang dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori menurut derajat kekuatan dan kepentingannya. Kuadran I menunjukkan bahwa stakeholder tersebut memiliki kekuatan dan kepentingan yang tinggi terhadap pembuatan kebijakan program pembangunan yang akan dilakukan. Sementara pada kuadran II, diwakili oleh mereka yang memiliki kekuatan rendah namun sangat berkepentingan dalam menerima manfaat dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Kuadran III menunjukkan derajat kekuatan yang rendah, sekaligus diikuti oleh kepentingan yang juga rendah. Mereka yang berada pada kuadran ini umumnya teridentifikasi sebagai masyarakat marjinal dengan tingkat partisipasi yang rendah dalam perencanaan kebijakan pembangunan kampung dikarenakan keterbatasan sumberdaya fisik dan non fisik. Lebih lanjut, kuadran IV memiliki derajat kekuatan rendah dalam proses pembuatan kebijakan namun sangat berkepentingan terhadap hasil dan dampak dari perumusan kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Secara potensi Kampung Gurimbang dapat disebut sebagai daerah yang mempunyai sejumlah potensi yang sangat berharga dan dapat dijadikan modal utama dalam proses pelaksanaan program-program pembangunan. Identifikasi potensi adalah salah satu langkah penting yang perlu dilakukan secara komprehensif dalam setiap upaya pemecahan masalah di suatu wilayah. Masyarakat dan lingkungannya secara relatif dapat dikatakan menyimpan sejumlah potensi yang dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan agar dapat meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Pemetaan sosial di Kampung Gurimbang telah berhasil mengidentifikasi beberapa aspek yang bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan masyarakat, yaitu: sumberdaya manusia, suprastruktur dan infrastruktur.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara mendalam (indepth interview) dapat dipetakan bahwa jaringan sosial di Kampung Gurimbang ditemukan interaksi antar aktor yang sifatnya positif dan negatif. Selain itu juga terdapat hubungan yang saling melengkapi satu sama lain, yang mana terdapat di hampir setiap garis interaksi antar individu- kelompok-institusi. Selain ini juga ditemukan bahwa stakeholder pembangunan di Kampung Gurimbang dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori menurut derajat kekuatan dan kepentingannya. Kelompok pertama adalah kelompok yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang tinggi terhadap pembuatan kebijakan program pembangunan yang akan dilakukan, yaitu: pemerintah. Sementara kelompok kedua, diwakili oleh mereka yang memiliki kekuatan rendah namun sangat berkepentingan dalam menerima manfaat dari kebijakan yang akan diimplementasikan, yaitu: lembaga masyarakat. Kelompok ketiga menunjukkan derajat kekuatan yang rendah, sekaligus diikuti oleh kepentingan yang juga rendah, yaitu: masyarakat. Secara umum tingkat partisipasi rendah dalam perencanaan kebijakan pembangunan kampung

dikarenakan keterbatasan sumberdaya fisik dan non fisik. Lebih lanjut, kelompok keempat memiliki derajat kekuatan rendah dalam proses pembuatan kebijakan namun sangat berkepentingan terhadap hasil dan dampak dari perumusan kebijakan tersebut, yaitu: perusahaan, dalam konteks penelitian ini adalah PT. Berau Coal. Hasil penelitian ini semakin mempertegas bahwa pemetaan sosial merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan guna memahami kondisi sosial masyarakat lokal agar penyusunan program pembangunan dapat berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat setempat (baca: keamanan manusia).

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, Krisdyatmiko, Danang Arif Darmawan, dan Soetomo. 2013. Indikator proper Hijau Aspek Pengembangan Masyarakat (Community Development) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Proper. Deputy Pengendalian dan Pencemaran Kementrian Lingkungan Hidup RI. Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Booth, Ken. 1991. Security and Emancipation, Cambridge University Press. <https://www.jstor.org/stable/20097269>.
- Handoyo, Pambudi & Arief Sudrajat. 2016. Pemetaan Sosial untuk Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemantren, Lamongan dalam Prosiding Seminar Nasional Mengawal Pelaksanaan SDGs (Sustainable Development Goals). ISBN : 978-979-028-859-1. Prodi Sosiologi Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. UNESA University Press. Surabaya.
- Nishikawa, Yukiko. 2010. Human Security in Southeast Asia, London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203850459>
- Nuryati, Rina, Lies Sulistyowati, Iwan Setiawan, Trisna Insan Noor. 2020. Pemetaan Sosial (Social Mapping) Masyarakat Dalam Upaya Mendukung Pengembangan Usaha Tani Polikultur Perkebunan Terintegrasi. Jurnal Argistan, Vol. 2, Nomor 1, Mei 2020.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013
- Sudiar, Sudiar. 2015. Konsolidasi Potensi Pembangunan: Studi Tentang Penanganan Kemiskinan di Kecamatan Muara Muntai-Kutai Kartanegara. Jurnal Paradigma, Vol. 4 No.2, Agustus 2015
- Sudiar, Sonny. 2019. Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. Jurnal Hubungan Internasional Vol. 7, No. 2 /Oktober 2018 - Maret 2019. <https://doi.org/10.18196/hi.72139>.
- Tjokroaminoto, M. (1996). Pembangunan Dilema dan Tantangan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). Human Security: Concepts and Implications. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203965955>